

**FUNGSI LURAH DALAM MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SIMPANG BARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

WAN INRAWAN

Email : wan_indrawan46@yahoo.com

Pembimbing : Drs. H.isril,MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study titled Function headman In Peace Organizing and Public Order In New Simpang Village Subdistrict Handsome Pekanbaru. The problem in this research is how the headman Function In Hold Public Peace and Order in the New District of Handsome Simpang Village Pekanbaru.

This includes research into the type of qualitative research that provides a descriptive overview of the headman Function In Hold Public Peace and Order in the New District of Handsome Simpang Village Pekanbaru. Based on the description that has been described previously, it can be concluded that the function of village chief in the implementation of peace and order in the Village District of New Simpang Handsome Pekanbaru already well underway.

Keywords: Function headman, Peace and Public Order

PENDAHULUAN

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur Negara yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana

daiharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membaea perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yagn lebih luas dalam penyelenggaraan

beberapa bidang pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kehidupan pemerintah, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat ini.

Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan pengembalian keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi subjek didalam pembangunan.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bias mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk diakses langsung oleh masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk

berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingnya sendiri. Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

Pemerintah Kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptanya pemerintah kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita masyarakat adil dan sejahtera.

Untuk itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan tugas-tugas tersebut, maka Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan sebagai salah satu Pemerintah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru tentunya harus berupaya untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-

baiknya agar masyarakat dapat merasakan dan terlayani dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan tentunya memerlukan dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk dapat memberikan masukan agar tugas-tugas yang dibebankan kepada Pemerintah Kelurahan dapat direalisasikan.

Perkembangan penduduk khususnya di Kelurahan Simpang Baru disebabkan karena arus urbanisasi tentunya membawa dampak, baik positif maupun negative. Salah satu dampak negative yang diribulkan adalah maraknya aksi-aksi kejahatan seperti pencurian, penjahbretan, geng motor dan sebagainya. Terkait dengan geng motor khususnya di wilayah Kelurahan Simpang baru telah terjadi pengeroyokan terhadap Febriandi warga tampan pekanbaru. Informasi yang diperoleh melalui Tribun Pekanbaru dijelaskan bahwa korban di sabet 20 kali dengan benda tajam. Pencurian yang sering terjadi di tempat kos mahasiswa dan juga warga masyarakat yang masih saja sering terjadi begitu juga penjahbretan yang selalu saja terjadi kapan saja.

Kondisi yang demikian tentunya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Fenomena yang kita lihat beberapa bulan terakhir, dimana geng motor melakukan tindakan kriminal, pencurian yang terjadi di kos mahasiswa hingga pada kasus penjahbretan dan pemerasan terhadap mahasiswa di areal Stadion Utama. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kelurahan Simpang Baru memiliki kewajiban bersama dengan instansi terkait untuk segera mengatasi agar

ketentraman dan ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Fungsi Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kerangka Teori

1. Teori Pemerintah

Ilmu pemerintah adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara Dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya segala upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff, 1982:8).

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan yaitu : pada dasarnya dibentuk untuk menjaga suatu system ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1997:100).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari sengaja kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkam peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Rasyid, 1997:13)

Tugas pokok pemerintahan dapat di ringkas menjadi tiga (3) fungsi yang dikehendaki, yaitu :

1. Pelayanan (*service*) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.
2. Pemberdayaan (*empowerment*) yang mendorong kemandirian masyarakat.
3. Pembangunan (*development*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997:48)

Permerintah dapat diartikan sebagai bahan atau lembaga-lembaga para penguasa sebagai pejabat pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tersebut diharapkan mentaati seluruh

ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara secara perseorangan maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan. (Situmorang, 1993:7).

Budiarjo (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), Kebijakan (*policy, beleid*) dan pembagian (*Distribution*) alokasi (*Allocation*).

Menurut Iyer dalam Syafie (2005:22), Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa perintah. Sedangkan Pemerintah menurut C.F. Strong dalam Pramuji (1992:23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pemerintah menurut Suryaningrat (1992:10-11) adalah :” Sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Sedangkan pemerintah adalah perbuatan atau cara atau urusan Pemerintah”.

Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedudukan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kesejahteraan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan social.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam TAP MPR No VII/MPR/2001 dalam bab IV BUTIR 9 (dalam Sedarmayanti 2004 :10) ditegaskan bahwa baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara adalah mencakup:

1. Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bebas korupsi dan nepotisme.
2. Terbentuknya penyelenggaraan Negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat diseluruh wilayah Negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan; berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktifitas politik

dan pemerintah. Terselenggaranya *good goverence* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerpan system pertanggungjawabn yan gtepat, jelas dan legimate, sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (Sedarmanyanti 2004:10)

2. Adminitrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintah menunjukkan bagaimana pemerrintah berperan sebagi agen tunggal yagn berkuasa yagn selalu aktif dan berinisiatif utuk mengatur atau mengambil langkah dan prakasa, menurut mereka penting bagi masyarakat. Masyarkat diperlukan sebagi pihak pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

Istilah dan pengertian Administrasi berasal dari bahasa latin *Administrare*, yang berarti melayani, memabntu dan memenuhi. Dari kata kerja itu terjadilah kata benda *Adminitratio*, yang dalam bahasa Inggris adalah *Administration* diartikan dalam bahas Indonesia. Adminitrasi diartikan sebagai perbuata penyelenggaran dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. (Widjaja, 2002:87).

Administrasi dalam pengertian diatas mempunyai unsure-unsr yaitu

organisasi, manajemen, kepegawian, keuangan , perbekalan, komunikasi, perwakilan/humas, dan ketatausahaan. Selain dari pada itu, itiah administrasi di Indonesia juga dipakai dalam arti Tata Usaha yakni kata yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia untuk istilah administrasi dalam bahasa Belanda.

Administrasi sebagaimana yang di kemukakan Siagian (dalam Syafiie, 2003:5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2004:7) administrasi pemerintahan (Negara) adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Kemudian menurut Ndraha (2003;508) yang dimaksud dengan administrasi pemerintah adalah proses penjagaan (*keeping* dan *caring*) dan penyampain (*forwarding* dan *delivering*) produk pemrintah tertentu kepada consumer dan memberdayakan consumer untuk menggunakan produk tersebut dengan cara dan alat yang sesuai dengan kondisi consumer sesegera mungkin sedemikian rupa sehingga consumer menerimanya utuh dan sadar, dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Dalam buku petunjuk administrasi terbitan Universitas Gadjah Mada, admistrasi disebutkan sebagai berikut (dalam Syafiie, 2003:6-7) :

1. Suatu aktivitas yant terutama bersangkutan degan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan semula.
2. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama,

abik usaha pemerintah maupun usaha swasta, baik usaha sipil maupun militer, baik usaha bersekala besar maupun usaha kecil-kecilan.

3. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
4. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usah kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi administrasi yang telah dikemukakan diatas, maka cirri-ciri administrasi (dalam Hamim, 2005:9) dapat digolongkan atas:

1. Adanya kelompok manusia yaitu kelompok yang terdiri atas dau orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
3. Adanya kegiatan/proses/usaha;
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengwasan ;
5. Adanya tujuan.

Kegiatan administrasi/ ketatausahaan untuk tingkat kelurahan meliputi segala kegiatan pengelolaan, pencatatan, pelaporan, penyimpanan dalam rangka mempelancarkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

Pelaksanaan administrasi umum di Kelurhan (dalam Widjaja, 2002:93) antara lain meliputi Buku Admistrasi Umum, yang terdiri dari :

1. Buku Keputusan Kelurahan
2. Buku Kepala Kelurahan
3. Buku Kekayaan dan Buku Inventaris Kelurahan
4. Buku Agenda
5. Buku Expedisi
6. Buku Aparat Pemerintah Kelurahan
7. Buku Tanah Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pemerintah Kelurahan berkewajiban melakukan pencatatan data pad Buku Administrasi Umum dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Seketaris Kelurahan.

Pelaksanaan Administrasi Penduduk, merupakan kegiatan pencatatan data tentang penduduk Kelurahan, yang meliputi Buku Administrasi Penduduk (dalam Widjaja, 2002 : 105) yang terdiri dari:

1. Buku Induk Penduduk
2. Buku Penduduk Sementara
3. Buku Perubahan penduduk
4. Buku Perkembangan Penduduk
5. Buku Kartu Keluarga
6. Buku Kartu Tanda Penduduk
7. Buku Jumlah Penduduk

Pemerintahan kelurahan berkewajiban unutk mengisi Buku Administrasi Penduduk secara teratur menurut waktu. Penduduk berkewajiban untuk memberikan keterangan secara lengkap dan benar yang diminta oleh Pemerintah Kelurahan dalam rangka Administrasi Penduduk.

- a. Pengisian Buku Administrasi dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Seketaris Daerah dan Sekretaris Kelurahan.
- b. Kepala Kelurahan sekurang-kurang sekali dlam 4 (empat) bbulan melaksanakan pemeriksaan terhadap buku administrasi penduduk yang dibuat oleh Seketaris Daerah atau Seketaris Kelurahan.

Sedangkan Administrasi Keuangan Kelurahan, Merupakan kegiatan pencataan data mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan Kelurahan pada Buku

Administrasi Keuangan Kelurahan, yaitu meliputi :

1. Buku Anggaran kelurahan
2. Buku Kas Umum
3. Buku Kas Pembantu

Penyelenggaraan kegiatan administrasi haruslah memasuki beberapa kriteria pokok yaitu rasional, efektif dan efisien. Untuk mencapai kriteria tersebut maka persyaratan bagi si pelaksana (dalam Manullang, 1972:113) antara lain.

- a. Merasa berkeinginan dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama
- b. Melakukan tugas-tugas yang menjdai bagian tanggungjawabnya.
- c. Menggunakan metode kerja yang paling sesuai.
- d. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dana, perlengkapan, bahan-bahan tempat kerja, serta waktu yang semuanya dimanfaatkan secara baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa administrasi pemerintah berupa rangkaian kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu sangat diharapkan peranan Pemerintah Kecamatan untuk membina administrasi kelurahan secara aktif demi terciptanya adminstrasi yang tertib dan lancar.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dimana punulis mencoba menganalisis suatu permasalahan yang timbul di lapangan dan hasil penelitian tersebut sekaligus menggambarkan permasalahan secara ceramat dan jelas.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gamabran secara deskriptif tentang Fungsi Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adapun pemilihan lokasi ini dilakukan karena sesuai dengan topik penelitian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1). Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data berupa informasi dari hasil proses wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian dan didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Lurah Simpang Baru beserta jajaranya, dan bebrapa masyarakat.

2). Data Skunder

Data skunder adaladh data tertulis yang sudah ada atau terseedia. Data tersebut berupa informasi-informasi dan keterangan-keterangan yagn diperlukan dalam melandasi penelitian ini, yang diperoleh dari kantor Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun yang terjadi sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di kantor Lurah Simpang Batu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Pengumpulaln data yang dilakukan pada penelitian ini

dilakukan dengan beberapa cara, yakni :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini.

b) Observasi (pengamatan langsung)

Yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui Fungsi Lurah Dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Simpang BARU Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c) Analisis Dokumen

Yaitu dengan analisis dokumen diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain : arsip-arsip, foto, laporan penelitian, dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian dalam kalimat yang jelas dan rinci, dokumen-dokumen data lainnya dengan membandingkan dengan berbagai pendapat. Kemudian

dilakukan pembahasan dengan analisis kualitatif.

FUNGSI LURAH DALAM MENYELENGGARAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Lurah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari camat untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah

Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah adalah melaksanakan tugas yang fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak dilengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Tugas Pokok Lurah antara lain: (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah secara umum, pembinaan pembangunan fisik dan nonfisik kemasyarakatan serta pembinaan kesejahteraan masyarakat, (2) Melaksanakan tugas dari pemerintah atasan, (3) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah

kelurahan, (4) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan dan (5) Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Menurut Thoha (2005:13) adapun tugas-tugas pegawai dalam menjalankan pemerintahan antara lain : Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian, Menyelenggarakan koordinasi, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian, Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan PNS, Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada instansi pemerintah, Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas, Melaksanakan kegiatan instansi pemerintahan dan Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Penetapan organisasi perangkat daerah dilakukan untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonomi sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan lurah

dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

Berkaitan dengan koordinasi dalam usaha untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seorang camat beserta stafnya harus mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Koordinator harus dilakukan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, artinya harus dilakukan oleh setiap orang mempunyai bawahan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan. Adapun cara-cara pimpinan mengadakan koordinasi dengan bawahannya menurut Malayu (2001:88) adalah dengan cara : Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik, Mengusahakan agar pengetahuan. Dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu. Adalah tujuan bersama, Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya, Mendorong para anggota, untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan

sasaran, Membina human relations yang baik antara sesama karyawan dan Manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan. Ringkasnya, suatu koordinasi akan lebih baik jika diperoleh dukungan, partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak tekaityang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Lurah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik..

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada Lurah hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan bawahannya khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sehingga akan tercipta ketentraman dan ketertiban yang lebih maksimal.
2. Kepada RT dan RW hendaknya tetap selalu

menjaga komunikasi dengan pihak kelurahan agar ketentraman dan ketertiban yang ada selalu dapat dijaga dengan baik

3. Kepada masyarakat hendaknya dapat mendukung dan selalu berpartisipasi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Burdiarjo, Mirian. 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dunn, William N, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hanin Dita.
- Handoko, T, Hani, 2009. *Manajemen edisi kedua*. Yogyakarta BPFE Yoygakarta.
- Hasibuan, H. Melayu SP, 2003. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, H. Melayu SP. 2003. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kaho, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kalo, J. 2003, *Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasan, dan Prilaku Kepala Daerah dalam*

- pelaksanaan Otonomi daerah,
PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI,
1993. Sistem Administrasi
Negara Rpublik Indonesia,
Haji Masagung, Jakarta.
- Manullang, M. 2008. Dasar-Dasar
Manajemen, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press
- Musanef. 1982. *Manajemen
Kepegawaian di Indonesia.*
Jakarta: CV. Haji.
- Nugroho D, Rian. 2003. Kebijakan
Publik Fomulasi,
Implementasi, dan Evaluasi.
Jakarta. Gramedia.
- Osborne, Dapids dan Plastrik, Peter,
2000, Memangkas Birokrasi ;
Lima Strategi Menuju
Pemerintahan Wirausaha,
Jakarta, lembaga manajemen
PPM
- Pamudji, 1986, Ekologi Administrasi
Negara, Jakarta, Bina Aksara
-, 2000,
Administrasi Pembangunan ;
Konsep, Demensi, dan
Strateginya, Jakart, Bina Rupa
Aksara.
- Rasyid Ryass, 1997. *Dinamika
Pemerintahan (Tinjauan dari
segi etika dan Kepemimpinan)*,
Penerbit Yarsif Waterphone,
Jakarta.
- Sedermayanti, 2004, *Good
Governance (kepemerintahan
yang baik)*, Bandung Bandar
maju.
- Situmorang, Victor. M. 1993, *Hukum
Administrasi Pemerintah di
Daerah*, Jakarta.
- Siagian, S.P. 2004. *Pokok-pokok
Pembangunan Masyarakat
Desa*. Yogyakarta : Citra Bakti
Aditia Media.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, Sistem
Pemerintahan Indonesia,
Jakarta: Rineka Cipta
- Thoha, Mifta, 2005, Manajemen
Kepegawaian Sipil di
Indonesia, Jakarta, Prenada
Media Grup
- Wasistiono, Sadu, 2003, Prospek
Pengembangan Desa,
Bandung, Fokus Media
- Wasta, Pariata, 1985, Pokok-pokok
Pengertian Manajemen,
Jakarta, Gunung Agung
- Widjaja, HAW, 2005,
Penyelenggaraan Otonomi di
Indonesia Dalam Rangka
Sosialisasi UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah
Daerah, Jakarta, Raja Grofindo
Persada
- Zulkifli. 2005, *Pengantar Studi Ilmu
Administrasi dan Manajemen*,
UIR PRESS. Pekanbaru
- Undang-undang No. 19 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Tentang
Kecamatan
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004,
Tentang Pemerintah Daerah
Beserta Penjelasannya

